

Universitas Ngudi Waluyo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora

Skripsi Januari 2024

Tri Endang Utami Ningsih

111201001

PROSES PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan dengan modus arisan online merupakan bagian dari tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penyelidikan dilakukan untuk penekanan pada pencarian dan penemuan peristiwa yang di dalamnya terdapat tindak pidana, sedangkan penyidikan merupakan tindakan yang memiliki penekanan pada pencarian dan penemuan alat bukti tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, dan keadilan bisa ditegakkan, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penyidikan tindak pidana penipuan arisan online sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan online harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengikat penyidik dan penyidikan, seperti Peraturan Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penyidikan antara lain sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online, sulitnya membuka rekening pelaku, keterbatasan alat khusus cyber crime yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, dan tidak seimbang antara jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum dengan jumlah personil aparat penegak hukum yang menangani kasus penipuan arisan online. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi khusus kepada masyarakat sebagai tindakan antisipatif yang lebih efisien dan revisi terhadap aturan yang sudah ada demi tercapainya tujuan penegakan hukum.

Kata Kunci: Penyidikan, Penipuan, Arisan Online

Ngudi Waluyo University Law Study
Program, Faculty of Economics, Law, and Humanities
January 2024 Thesis
Tri Endang Utami Ningsih
111201001

**INVESTIGATION PROCESS IN THE CRIMINAL ACT OF ONLINE
SOCIAL GATHERING FRAUD**

ABSTRACT

The criminal act of fraud using the online social gathering mode is part of the criminal act in the field of Information and Electronic Transactions which is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Investigations are carried out to emphasize the search and discovery of events in which there is a criminal act, while investigations are actions that have an emphasis on the search and discovery of evidence of criminal acts as intended in the law, and justice can be upheld, as mandated by the Constitution 1945. The research uses normative juridical methods to examine everything related to the process of investigating criminal acts of online social gathering fraud in accordance with the provisions of the governing law. Based on the results of the research and discussions that have been carried out, it can be concluded that the process of investigating criminal acts of online fraud must be carried out in accordance with statutory regulations that bind investigators and investigators, such as the 2019 Regulations concerning Criminal Investigations and the Criminal Procedure Code. (Criminal Code). Apart from that, the obstacles faced by law enforcement officers in the investigation process include the difficulty of tracking perpetrators of online fraud crimes, the difficulty of opening perpetrators' accounts, the limitations of special cyber crime tools owned by law enforcement officers, and the imbalance between the number of cases handled by law enforcement officers. with the number of law enforcement personnel handling online social gathering fraud cases. Therefore, there is a need for special education to the public as a more efficient anticipatory action and revision of existing regulations in order to achieve law enforcement objectives.

Keywords: Investigation, Fraud, Online Social gathering